

DAFTAR ISI

	68
BAB 3 WAWASAN NASAWAY	17
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2002	17
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003	17
KATA SAMBUTAN KETUA STMT TRISAKTI	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar-dasar	9
B. Pendidikan Kewarganegaraan	10
1. Visi dan Misi	10
2. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan	12
3. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan	14
C. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan	18
1. Undang-Undang Dasar 1945	18
2. Tahun 1950	19

3.	Tahun 1957-1960	19
4.	Tahun 1974	20
5.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan Keamanan Negara	21
6.	Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud No. 25/Dikti/Kep/1985	23
7.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional	24
8.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	25
9.	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2002	26
10.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	26
11.	Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	29
BAB 2	HAK ASASI MANUSIA	45
A.	Pengertian HAM	45
1.	Pengertian HAM	45
2.	Sejarah HAM	46
3.	Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia	51
4.	Perkembangan Pemikiran HAM 1908 Sampai Sekarang	53
B.	Implementasi HAM	56
C.	Pelanggaran dan Pengadilan Hak Asasi Manusia	59

D.	Pengadilan Hak Asasi Manusia/Sistem Pengadilan Hak Asasi Manusia	61
E.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM	66
1.	Hak Asasi dan Kewajiban Dasar	66
2.	Substansi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia	67
3.	<i>Universal Declaration of Human Rights</i> (Piagam HAM PBB, 10 Desember 1948)	68
BAB 3	WAWASAN NUSANTARA	71
A.	Wawasan Nasional	71
1.	Wawasan Nasional	71
2.	Wawasan Nusantara	73
3.	Dasar Pemikiran	74
4.	Latar Belakang Wawasan Nusantara	75
B.	Wilayah Nasional	82
C.	Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia	84
1.	Wilayah Daratan	86
2.	Wilayah Lautan/Perairan	86
3.	Wilayah Udara	88
D.	Implementasi Wawasan Nusantara di Era Globalisasi	89
1.	Aspek-aspek Positif dari Implementasi Konsep Wawasan Nusantara di Era Globalisasi	90
2.	Aspek-aspek Negatif dari Implementasi Wawasan Nusantara Era Globalisasi	91

BAB 4 KETAHANAN NASIONAL	93		
A. Pengertian Ketahanan Nasional	93		
1. Pengertian Ketahanan Nasional	93		
2. Ketahanan Nasional (<i>National Resilience</i>)	94		
3. Permasalahan Ketahanan Nasional	95		
4. Tujuan Ketahanan Nasional	96		
5. Sifat Ketahanan Nasional	97		
6. Konsepsi Ketahanan Nasional	99		
7. Asas Ketahanan Nasional	101		
B. Konsepsi Ketahanan Nasional Meliputi Aspek-aspek Kehidupan	103		
1. Aspek Alamiah (Tri Gatra)	103		
2. Aspek Sosial (Panca Gatra)	105		
C. Hubungan Antara Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Pembangunan Nasional	109		
1. Wawasan Nusantara Merupakan Sistem Nilai	109		
2. Ketahanan Nasional adalah Kondisi Dinamis Bangsa Indonesia	110		
3. Pembangunan Nasional adalah Proses yang Perlu Diwujudkan	110		
4. Perjuangan Mencapai Tujuan Nasional	111		
D. Hakikat Ketahanan Nasional	111		
BAB 5 POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL	113		
A. Politik Strategi Nasional (Polstranas)	113		
1. Pengertian Politik dan Strategi	113		
2. Politik Nasional	115		
3. Strategi Nasional	115		
4. Politik dan Strategi Nasional (Polstranas)	115		
B. Sistem Politik	116		
1. Sistem Politik Indonesia	116		
2. Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD Tahun 1945	117		
C. Dasar-dasar Politik dan Strategi Nasional	118		
D. Proses Penyusunan Politik dan Strategi Nasional	138		
1. Mekanisme Penyusunan Polstranas	140		
2. Sistem Manajemen Nasional	142		
3. Stratifikasi Sistem Manajemen Polstranas	143		
E. Otonomi Daerah	151		
F. Kewenangan Daerah	154		
G. Polstranas dalam Bidang Politik Luar Negeri	155		
1. Zaman Orde Lama, Presiden Soekarno, Tahun 1945–1966	156		
2. Zaman Orde Baru, Presiden Soeharto, Tahun 1966–1998	157		
3. Zaman Reformasi	158		
BAB 6 PANCASILA	161		
A. Sejarah Perjuangan Bangsa	161		
1. Zaman Sriwijaya	161		
2. Zaman Majapahit	162		
3. Zaman Kemerdekaan	163		
4. Nama Indonesia	166		

B.	Pergerakan Nasional	167
A.	1. Pergerakan dalam Bentuk Organisasi	167
	2. Penjajahan Jepang di Indonesia	168
C.	Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia	169
	1. Sidang Pertama BPUPKI	170
	2. Sidang Kedua BPUPKI	176
	3. Terbentuknya PPKI	177
D.	Perubahan Pancasila Sesuai dengan Dasar-dasar Negara	178
E.	Tujuan Pendidikan Pancasila	179
	1. Tujuan Pendidikan Pancasila	179
	2. Landasan Dasar Pendidikan Pancasila	180
	3. Landasan Hukum Negara RI	181
	4. Fungsi Pancasila	182
F.	Demokrasi Pancasila	200
	1. Pengertian Demokrasi Pancasila	200
	2. Nilai-nilai Demokrasi Pancasila	201
	3. Bentuk-bentuk Sistem Pemerintahan	201
G.	Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945	207
BAB 7	UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945	209
A.	Lahirnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945	209
B.	Pengertian Undang-Undang Dasar Tahun 1945	210
C.	Sifat Undang-Undang Dasar Tahun 1945	210
D.	Perubahan/Amandemen UUD 1945	211

1.	Amandemen I, Tanggal 19 Oktober 1999	211
2.	Amandemen II, Tanggal 8 Agustus 2000	211
3.	Amandemen III, Tanggal 10 November 2001	212
4.	Amandemen IV, Tanggal 10 Agustus 2002	212
E.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	214

DAFTAR PUSTAKA	249
INDEKS	255
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	259

A. Latar Belakang

1. Latar Belakang

"HUBBUL WATHAN NISFUL IMAN" Cinta Tanah Air adalah sebagian dari iman. Keimanan daripada warga negara adalah merupakan ukuran tingkat kesadaran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya penanaman dan penumbuhan serta Penguatan Kesadaran Bela Negara, tidak bisa dilepaskan dengan prinsip dasar pembinaan sumber daya manusia anak bangsa atau warga negara dalam suatu organisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Guna menjamin kelangsungan kehidupan organisasi berbangsa dan bernegara, dimaksud perlu dan harus dilakukan penguatan kesadaran kolektif terhadap anak bangsa dan warga negaranya sebagai anggota organisasi untuk memiliki komitmen mempertahankan diri dari ancaman terhadap kelangsungan eksistensinya.